
OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA SEBAGAI DAERAH 3T DI INDONESIA

Aldho Faruqi Tutukansa¹, Enjang Dwi Tuffahati²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

ABSTRAK

Indonesia menjadi negara dengan kualitas mutu pendidikan yang tergolong rendah terutama pada daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). *Programme for International Student Assessment 2019* menyatakan bahwa, kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Provinsi Papua menjadi wilayah dengan jumlah daerah 3T terbanyak di Indonesia dengan total tiga puluh kabupaten. Rendahnya kualitas mutu pendidikan daerah 3T disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat, kualitas sumber daya manusia, hingga akses pendidikan yang tidak merata. Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran fenomena daerah 3T di Indonesia, seperti kualitas mutu pendidikan di Provinsi Papua. Kemudian, terdapat rekomendasi kebijakan dalam mengoptimalkan kualitas mutu pendidikan melalui upaya-upaya pemerintah pusat dan daerah. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Apabila dapat dilakukan pemerataan pendidikan di Indonesia beserta peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, maka Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan menjadi negara unggul dalam aspek pendidikan.

Kata Kunci: *Kualitas Mutu Pendidikan, Daerah 3T, Provinsi Papua, Sumber Daya Manusia*

ABSTRACT

Indonesia is a country with a relatively low quality of education, especially in the 3T (Outermost, Frontier, Disadvantaged) areas. The 2019 Programme for International Student Assessment states that Indonesia's education quality ranks 72nd out of 77 countries. Papua Province has the highest number of 3T areas in Indonesia with a total of thirty districts. The low quality of education in the 3T areas is caused by the social conditions of the community, the quality of human resources, and unequal access to education. This paper aims to provide an overview of the phenomenon of the 3T regions in Indonesia, such as the quality of education in Papua Province. Then, there are policy recommendations in optimizing the quality of education quality through the efforts of the central and local governments. The writing of this scientific paper uses a type of qualitative method with primary and secondary data sources. If education equality in Indonesia can be carried out along with improving the quality of the quality of educators and educational facilities, then Indonesia can catch up and become a superior country in the aspect of education.

Keywords: *Quality of Education, 3T Areas, Papua Province, Human Resources*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor vital sekaligus pembangun peradaban bangsa yang dalam praktiknya perlu dioptimalkan pelaksanaan dan peningkatan mutu kualitasnya. Dalam konstitusi negara telah disebutkan bahwa, setiap masyarakat Indonesia

berhak mendapatkan hak dalam mengakses pendidikan. Selain itu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan juga menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam membangun peradaban bangsa dan mencapai kesejahteraan sosial,

pendidikan menjadi langkah awal untuk mempersiapkan mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang dapat bersaing secara global. Pemerataan pendidikan sudah seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Pemerataan pendidikan dan segala aspek pendukungnya menjadi hal yang perlu dioptimalkan pemerintah.

Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pemerataan pendidikan dalam praktiknya belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) menjadi daerah di Indonesia yang masih berada dalam kualitas pendidikan rendah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai problematika daerah 3T, seperti minimnya tenaga pendidik, pembangunan sarana pendidikan yang pasif, sulitnya aksesibilitas pada sarana prasarana pendidikan, kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, hingga mobilitas sosial yang belum mendukung masyarakat. Urgensi pengoptimalan pendidikan pada daerah 3T tentu menjadi hal yang perlu diupayakan pemerintah mengingat hingga tahun 2020 masih terdapat 62 kabupaten di Indonesia yang tergolong dalam daerah 3T.

Persebaran daerah 3T di Indonesia ini masih tersentralisasi pada wilayah Timur Indonesia khususnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Provinsi Papua menjadi wilayah di Indonesia dengan jumlah daerah 3T terbanyak dengan total tiga puluh kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari kualitas mutu pendidikan hingga sumber daya manusia, seperti masyarakat maupun tenaga pendidik yang belum memadai. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua hanya mencapai 60,62% dengan tujuh belas kabupaten ber-IPM rendah. (1) Atas dasar ini, peningkatan mutu kualitas pendidikan di Provinsi Papua menjadi perlu dioptimalkan demi meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mendorong Papua menjadi daerah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut:

- a. Daerah 3T merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan pembangunan daerah yang cukup rendah, sehingga menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata dan tidak dapat diakses.
- b. Papua sebagai daerah 3T mengalami permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Daerah, dan Sarana Prasarana Pendidikan yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah dan buta huruf di Provinsi Papua.
- c. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan kualitas mutu pendidikan di Provinsi Papua.

2. METODE

2.1 Landasan Teori

Adapun teori yang dapat digunakan pada karya tulis ini, yaitu Teori Implementasi Kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan, Implementasi Kebijakan dapat didefinisikan sebagai penerapan pada keputusan dan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. (2) Kemudian, definisi pada teori ini makin diperkuat dengan pernyataan dari George C. Edwards menjelaskan, bahwa ketika kebijakan sedang diimplementasikan, terdapat empat indikator variabel yang berpengaruh pada pelaksanaannya, seperti:

A. Disposisi

Istilah terhadap sifat, karakteristik, dan watak yang dimiliki dan berasal dari pihak yang membuat kebijakan. Hal ini menjadi sebuah komitmen dan konsekuensi dari pembuat kebijakan, ketika kebijakan tersebut telah disusun dan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, berdasarkan dari kesesuaian harapan dan pandangan dari pembuat kebijakan. Akan tetapi, disposisi tentu memiliki tantangan ketika dihadapkan dengan perbedaan perspektif antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Perbedaan ini menimbulkan pelaksanaan kebijakan yang kurang efektif.

B. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu pokok inti pada faktor implementasi kebijakan. Hal ini didasari dengan strategi yang dilakukan pembuat kebijakan dengan menyampaikan sasaran dan tujuan pada kebijakan yang dituju kepada pelaksana kebijakan. Tujuannya agar mengurangi pemutarbalikan implementasi kebijakan.

C. Struktur Birokrasi

Struktur ini lebih cenderung dikategorikan dalam jenis struktur organisasi. Mereka berperan dalam mengimplementasi kebijakan dengan cara menerapkan aspeknya, yaitu fragmentasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Dengan kedua aspek tersebut maka kebijakan yang dilaksanakan mampu memiliki prosedur dan kontrol yang baik, secara signifikan dengan syarat tidak terlalu panjang dan rumit.

D. Sumberdaya

Sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan harus terpenuhi dengan sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasarana, hingga keuangan. Hal ini sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kekurangan.

Sehingga, empat indikator tersebut menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan kualitas mutu pendidikan di Papua. (3)

2.2 Tujuan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena daerah 3T di Indonesia yang mengalami permasalahan kualitas mutu pendidikan, seperti Provinsi Papua, serta mengoptimalkan kualitas mutu pendidikan melalui kebijakan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Persebaran Daerah 3T di Indonesia

Daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 didefinisikan sebagai daerah dengan kualitas pembangunan daerah yang cukup rendah dan kondisi masyarakat yang kurang berkembang. Berdasarkan aspek geografis, daerah 3T terletak pada wilayah terdepan dan terluar dari Indonesia. Daerah 3T dapat dikategorikan melalui kondisi perekonomian, sosial, budaya, dan wilayah, seperti alam, manusia, sarana, hingga prasarana. Secara lebih spesifik, terdapat 6 kategori dasar dalam penentuan daerah tertinggal yang diatur berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional antara lain:

- A. Perekonomian Masyarakat Indikator ini menggunakan data pendapatan perkapita masyarakat dan persentase penduduk miskin.
- B. Sumber Daya Manusia (SDM) Kriteria ditinjau dari harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah dari masyarakat setempat.
- C. Sarana Prasarana Aspek yang diukur berupa ketersediaan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, elektrifikasi, air bersih, telekomunikasi, dan ekonomi.
- D. Kemampuan Keuangan Daerah Indikator yang diukur berupa proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini digunakan untuk melihat kapasitas daerah dalam melakukan pembangunan.
- E. Aksesibilitas Merupakan kemampuan daerah dalam menjembatani masyarakat untuk mengakses sarana prasarana yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah, dan fasilitas umum.
- F. Karakteristik Daerah

Ditinjau dari jenis maupun frekuensi bencana alam maupun fenomena sosial daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, daerah khusus didefinisikan sebagai daerah tertinggal yang berbatasan langsung dengan negara lain, berada dalam kondisi darurat, seperti bencana alam dan daerah yang berbentuk pulau kecil dan terluar dari Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia masih memiliki daerah tertinggal sebanyak 62 kabupaten yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1) tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Penetapan daerah tertinggal di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah.(4) Berikut peta persebaran daerah tertinggal di Indonesia tahun 2020-2024:



Gambar 1. Peta Persebaran Daerah 3T di Indonesia

(Sumber: Website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Dari gambar diatas, persebaran daerah 3T di Indonesia masih didominasi pada wilayah Timur, yakni Provinsi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Provinsi Papua menjadi wilayah dengan jumlah daerah 3T terbanyak dengan total 30 kabupaten kota. Kemudian disusul wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi daerah tertinggal terbanyak kedua di Indonesia dengan total 14, Pulau Maluku dengan 8 kabupaten dan Pulau

Sumatera dengan 7 kabupaten.(4) Terlihat di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sudah tidak terdapat daerah 3T karena membaiknya kualitas mutu pendidikan, pembangunan daerah yang masif, dan kemampuan keuangan daerah yang mumpuni. Selain itu, jumlah daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya 122 daerah menjadi 62 daerah.

3.2 Persebaran Daerah 3T di Provinsi Papua Tahun 2020-2024

Provinsi Papua menduduki tingkat tertinggi daerah 3T dengan total 30 kabupaten yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo.

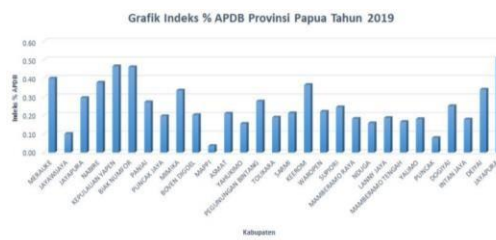
Setidaknya terdapat tiga faktor penyebab Provinsi Papua menjadi wilayah dengan daerah 3T, yakni aksesibilitas dan karakteristik daerah, sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan daerah yang belum merata hingga ke pedalaman Papua membuat belum masifnya aksesibilitas masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, capaian pembangunan daerah di Provinsi Papua masih didominasi dengan daerah ber IPM rendah (< 60) dengan total 17 kabupaten, sedangkan status "sangat tinggi" (IPM > 80) hanya diraih satu kabupaten/kota, yakni Kota Jayapura. Selain itu, Provinsi Papua menjadi daerah dengan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah

di Indonesia dengan IPM Papua sebesar 60,62% dan IPM Nasional Indonesia sebesar 72,29% .

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pasca adanya pandemi Covid-19 IPM Papua di tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan hingga 0,40%. Di tahun 2021, IPM Papua berhasil meningkat kembali sebesar 0,30%, namun peningkatan IPM ini masih belum mempengaruhi peningkatan IPM pada tahun sebelumnya, 2019. Selain nilai IPM secara umum, Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Papua pada tahun 2020-2021 juga mengalami perlambatan dengan perolehan 0,21%. Nilai ini mengalami perlambatan dari tahun 2018 dan 2019 dengan masing masing 0,34% dan 0,44%. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Papua juga mengalami penurunan dari tahun 2019 berada di angka 7.336 menjadi 6.954 dan 6.955 di tahun 2020 dan 2021. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa IPM Papua turun di titik terendah pada tahun 2020 dan kembali membaik secara bertahap di tahun 2021.

3.3 Kualitas Pendidikan di Provinsi Papua

Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Pertama, dan Jenjang Pendidikan Atas. Dalam mengetahui kualitas pendidikan suatu wilayah dapat dilakukan dengan melihat indeks pendidikan wilayah yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan kemampuan keuangan daerah untuk pendidikan dalam dana APBN. APM merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu, yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang seharusnya atau dapat diartikan sebagai kesesuaian antara umur penduduk dengan ketentuan usia sekolah di jenjang tersebut.(1) Sedangkan dana APBN untuk pendidikan dapat menunjukkan seberapa masifnya pembangunan penunjang pendidikan di wilayah.



Gambar 2. Indeks APBD Provinsi Papua 2019

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah)

Tabel 1. Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua tahun 2019

Kabupaten	APM SD		APM SMP		APM SMA	
	Aktual	Indeks	Aktual	Indeks	Aktual	Indeks
MERAUKE	92.74	0.85	70.07	0.67	64.78	0.72
JAYAWAJAYA	89.83	0.79	74.31	0.72	66.87	0.75
JAYAPURA	93.90	0.88	71.34	0.69	67.31	0.75
NABIRE	88.50	0.77	67.68	0.64	61.49	0.68
KEPULAUAN YAPEN	91.54	0.83	65.06	0.61	54.94	0.60
BIAK NUMFOR	90.97	0.82	70.71	0.68	62.26	0.69
PANIAI	72.29	0.43	52.58	0.46	25.44	0.22
PUNCAK JAYA	75.44	0.50	24.97	0.13	21.22	0.16
MIMIKA	91.59	0.83	75.11	0.73	67.05	0.75
BOVEN DIGOEL	85.70	0.71	66.44	0.63	34.63	0.33
MAPII	83.25	0.66	35.20	0.25	16.42	0.10
ASMAT	82.65	0.65	35.87	0.26	20.59	0.15
YAHUKIMO	61.52	0.21	26.36	0.14	12.33	0.05
PEGUNUNGAN BINTANG	84.70	0.28	29.09	0.18	21.36	0.16
TOLIKARA	60.03	0.18	52.24	0.45	33.78	0.32
SARMI	91.39	0.82	74.99	0.73	52.22	0.56
KEEROM	85.20	0.70	71.42	0.69	60.95	0.67
WAROPEN	89.81	0.79	71.65	0.69	61.01	0.67
SUPIORI	94.85	0.89	62.30	0.58	56.52	0.62
MAMBERAMO RAYA	96.82	0.94	56.20	0.50	51.44	0.55
NDUGA	56.84	0.12	34.68	0.24	9.35	0.01
LANNY JAYA	69.56	0.38	68.00	0.64	46.05	0.48
MAMBERAMO TENGAH	86.36	0.72	71.36	0.69	54.41	0.59
YALIMO	80.76	0.61	52.08	0.45	28.26	0.25
PUNCAK	51.02	0.00	23.09	0.10	9.13	0.01
DOGUYAI	85.74	0.71	68.65	0.65	39.22	0.39
INTAN JAYA	60.85	0.20	14.58	0.00	8.61	0.00
DEIYAI	81.94	0.22	45.53	0.37	51.28	0.55
JAYAPURA	94.66	0.89	78.02	0.77	62.15	0.69

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah)

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa, APM Provinsi Papua mengalami fluktuatif nilai yang cukup signifikan pada tiap jenjang pendidikan di tiap kabupaten. APM terendah Provinsi Papua terdapat di Kabupaten Puncak dengan indeks APM SD sederajat mencapai angka 0,00 dengan aktualisasi 51,02%. Sedangkan APM tertinggi diraih oleh Kabupaten Jayapura. Perbedaan indeks APM setiap kabupaten ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan anak, hingga perbedaan

kelas dan mobilitas sosial masyarakat. Selain itu, perbedaan strata sosial dan faktor keamanan menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap rendahnya APM beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Senada dengan yang disampaikan Yuni Wonda selaku Bupati Puncak Jaya, bahwa banyak tenaga pendidikan di kabupaten tersebut yang meninggalkan lokasi tugas karena ancaman keamananan dari beberapa kelompok masyarakat. Sehingga, Angka Partisipasi Murni (APM) mempengaruhi kualitas mutu pendidikan di Provinsi Papua.

Dana APBD setiap Kabupaten di Provinsi Papua juga berbeda satu sama lain. Alokasi dana terbesar di dapatkan Kota Jayapura sebagai Ibukota provinsi dengan persentase 25,87. Sedangkan alokasi dana APBN terendah terdapat pada Kabupaten Mappi dengan presentase 2,05%. Perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan ini terjadi karena beberapa faktor, seperti alokasi dana pada sektor khas yang lebih potensial. Wilayah dengan mobilitas sosial dan aksesibilitas tinggi akan mendapatkan alokasi Dana APBN yang tinggi pula dalam mendukung pembangunan daerah tersebut termasuk dalam sektor pendidikan. Hal ini yang membuat persebaran dana APBN pada setiap daerah di Provinsi Papua berbeda. Dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan Provinsi Papua, pemerintah diharapkan dapat megkhususkan alokasi dana APBN untuk pendidikan pada daerah yang masih tertinggal dan membutuhkan dukungan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3.4 Problematika Tenaga Pendidik dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di Papua

Melihat dari persebaran dan kondisi Pendidikan di daerah 3T disebabkan dari berbagai faktor pada Sistem Pendidikan di Indonesia. Problematika tersebut berhubungan dengan Ketenagaan Pendidik dan Fasilitas Sarana Prasarana di berbagai instansi Pendidikan di Indonesia. Penjelasan tersebut dapat

diklasifikasikan menjadi dua hal seperti berikut:

A. Problematika pada Tenaga Pendidik di Papua

Tenaga Pendidik (guru) menjadi bagian problematika di daerah 3T. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor yang membuat proses pelaksanaan pendidikan di Papua menjadi terhambat. Tenaga pendidik/guru dikategorikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi standar terhadap kualitas pendidikan. Tenaga pendidik dapat dikategorikan seperti guru, staf, dosen, struktur sekolah, hingga administrasi. Alasan mengapa tenaga pendidik ini menjadi sorotan dalam problematika Pendidikan di Indonesia, bahwa ada banyak sekali kendala yang dihadapi, seperti pengembangan SDM terhadap pengajar yang perlu dibenahi. Hal ini berkaca pada sebuah kasus yang terjadi di Papua, di mana SDM Pengajar yang masih sangat minim. Berdasarkan data pada Neraca Pendidikan Daerah yang dirilis oleh Kemendikbud tahun 2020, bahwa masih banyak sekali guru yang mengajar di tingkatan yang berbeda, namun belum mendapatkan sertifikasi resmi pendidik di Papua. Bahkan, dalam tingkatan PAUD, persentase guru yang belum mendapatkan sertifikasi dapat dikatakan sangat tinggi sekitar 89,4% dan diikuti dengan tingkatan SD dengan persentase sebesar 84,1% yang belum mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik.



Gambar.3 Data Neraca Pendidikan Daerah di Provinsi Papua

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Melihat dari data diatas, bahwa tingginya tenaga pendidik yang belum tersertifikasi disebabkan ketika melakukan pelaksanaan sertifikasi guru terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi. Kesulitan tersebut berupa standar yang belum dipenuhi pada jenjang pendidikan guru di Provinsi Papua. Kemudian, berdasarkan pernyataan dari James Modouw, Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua, bahwa sebanyak 32,000 guru di Provinsi Papua, guru yang telah bersertifikasi hanya terdapat tujuh persen yang lolos dan hal tersebut dikatakan masih minimnya guru yang telah bersertifikasi. (5) Bahkan, lebih spesifik lagi terjadi di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua masih memiliki tenaga pendidik yang bersertifikasi dengan jumlah yang sangat sedikit, khususnya pada guru PAUD dan SD. Hingga saat ini, Kota Jayapura hanya memiliki 163 guru, namun dari jumlah tersebut sebagian besar hanya mampu mencapai tingkatan SMA atau belum mendapatkan gelar sarjana.(6) Tidak lupa juga, sebagian guru juga telah mengenyam pendidikan sarjana, akan tetapi mereka juga masih belum mendapatkan sertifikasi resmi sebagai guru PAUD. Kejadian seperti ini tentu memerlukan sebuah penanganan dalam memberikan pelatihan terhadap guru-guru PAUD dan SD di Jayapura agar menjadi efektif.

B. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik tentu menjadi perhatian utama sebagai penggerak pendidikan, dari segi kualitas hingga kuantitas. Kualitas yang diperlihatkan, yaitu tenaga pendidik menjadi garda terdepan dalam memajukan generasi-generasi bangsa. Perubahan tersebut dapat dikatakan, bahwa guru mampu membangkitkan semangat dan memberi motivasi kepada siswa untuk meningkatkan keinginan belajar. Sehingga dengan dorongan dari guru akan mengantarkan siswa menuju gerbang keberhasilannya

melalui prestasi.(7) Sedangkan, kuantitas yang diperlukan yaitu jumlah tenaga pendidik yang tersebar di wilayah di Indonesia. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam kaitannya dari segi kualitas dan kuantitas, yaitu kurangnya peminat dalam pendaftaran lowongan pekerjaan guru di daerah 3T. Melalui pernyataan dari Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Nunuk Suryani menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran guru dan P3K, daerah 3T menjadi daerah yang hanya diminati dengan jumlah yang sangat sedikit. Padahal, lowongan posisi guru di daerah 3T memiliki jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 179,769 lowongan bahkan selama pendaftaran tersebut ternyata tidak ada pelamarnya.(8) Permasalahan seperti ini juga dialami oleh provinsi Papua, seperti seluruh kabupaten dan kota di provinsi Papua memiliki jumlah lowongan tenaga pendidik yang banyak, namun tidak ada tenaga pendidik yang melamar ke dalam lowongan tersebut. Hal seperti ini membuat kesenjangan pada proses pelaksanaan pendidikan semakin terhambat. Melalui kasus seperti ini tentu menyangkut pada kekurangan guru yang dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan secara berkepanjangan pada Pendidikan di Indonesia. Sebab, bukan hanya jumlah pendaftarannya saja yang dipermasalahkan, melainkan dapat menghambat proses perkembangan siswa di daerah 3T yang mengakibatkan kesenjangan dan kekurangan pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan.

Permasalahan tenaga pendidik/guru juga diikuti dengan kurangnya penyediaan fasilitas, seperti sarana dan prasarana terhadap instansi pendidikan. Sarana dan prasarana, seperti peralatan, tempat, dan perlengkapan-perengkapan yang digunakan sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Hingga saat ini,

penyediaan sarana dan prasarana di daerah 3T dikatakan masih belum memadai. Seperti di Papua yang disebabkan kurangnya pemerataan pembangunan. Salah satu daerah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam bentuk jurnal, bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki sebanyak 62 sekolah yang telah didirikan, yaitu 1 SMA Negeri, 1 SMA Swasta, 2 SMP Negeri, 10 SMP Swasta, 21 SD Negeri, 9 SD Swasta, 18 TK atau PAUD.(9) Jumlah sekolah masih sedikit karena sudah dibangun, namun persediaan sarana dan prasarana di sekolah masih belum lengkap, seperti buku pelajaran, seragam sekolah, hingga minimnya perpustakaan di berbagai sekolah pada Kabupaten Jayawijaya. Jika dispesifikkan, Kabupaten Jayawijaya terdapat salah satu sekolah dasar, yaitu SD Inpres Megapura. Permasalahan pada sarana dan prasarana yang dihadapi, yaitu kekurangan pada jumlah buku pelajaran, seperti satu buku pelajaran untuk lima siswa. Lalu, sekolah yang berada di Kabupaten Wamena, yaitu SMP Negeri 2 Wamena, di mana terdapat buku-buku pelajaran yang masih pada standar kurikulum yang lama di perpustakaan yang dimiliki pada sekolah tersebut.(9)

4. KESIMPULAN

Suatu daerah digolongkan menjadi daerah 3T dari beberapa aspek antara lain Perekonomian Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah, Aksesibilitas, dan Karakteristik Daerah. Pembangunan daerah yang belum merata hingga pedalaman Papua membuat belum masifnya aksesibilitas masyarakat dan menjadi daerah dengan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia. Kualitas mutu pendidikan di

Provinsi Papua berdasarkan indeks Angka Partisipasi Murni (APM) juga masih tergolong rendah dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan, perbedaan strata sosial, serta faktor keamanan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T, perlunya perhatian penting dalam mengupayakan agar pendidikan di Papua mampu terlaksana dengan efektif dan efisien.

Provinsi Papua dihadapi dengan berbagai problematika pada aspek pendidikan, seperti permasalahan pada tenaga pendidik yang dihadapi dengan SDM yang mengalami kekurangan. Kemudian, permasalahan pada penyediaan sarana dan prasarana menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan sebagai fasilitas penunjang dalam memberikan kelancaran pada pendidikan, baik untuk guru maupun siswa. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah sebelumnya tentu menjadi pembahasan yang sangat penting. Hal ini mengacu pada konsep teori implementasi kebijakan, dimana tindakan maupun kebijakan yang telah dilaksanakan tentu memiliki hal-hal yang terjadi, seperti keberhasilan implementasi kebijakan termasuk dalam sisi positif hingga ketidakefektifan dan kendala yang dihadapi dapat mengarah pada sisi negatif. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan mutu kualitas pendidikan Provinsi Papua, melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pada IPM, memperhatikan lebih khusus sertifikasi dan kesejahteraan guru, dan pemberian jaminan keamanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistika. Statistik Indonesia 2022. bps.go.id [Internet]. 2022;

-
- Available from:
<https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
2. Winarno B. Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service; 2012.
 3. Edwards GC. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press. Hartawan, T. (2012, October 24). Guru di Papua Hanya 7 Persen Lolos Sertifikasi. Nasional Tempo.co. Retrieved May 30, 2022. Nasional Tempo [Internet]. 1980; Available from: <https://nasional.tempo.co/read/437468/guru-di-papua-hanya-7-persen-lolos-sertifikasi>
 4. Kemendesa. Portal Sistem Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Kemendesa [Internet]. 2020; Available from: <https://www.kemendesa.go.id/>
 5. Hartawan T. Guru di Papua Hanya 7 Persen Lolos Sertifikasi. Nasional Tempo.com [Internet]. 2012; Available from: <https://nasional.tempo.co/read/437468/guru-di-papua-hanya-7-persen-lolos-sertifikasi>
 6. Ramah. Kota Jayapura Kekurangan Guru TK Dan PAUD. jubi.co.id [Internet]. 2019; Available from: <https://jubi.co.id/kota-jayapura-kekurangan-guru-tk-dan-paud/>
 7. Leonard. Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. Form J Ilm Pendidik MIPA. 2016;5(3):193.
 8. Shanti HD. Lowongan guru di daerah 3T kurang diminati. Antaranews.com [Internet]. 2021; Available from: <https://www.antaranews.com/>
 9. Worabay, M. G., Kiyai, B., & Kolondam HF. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua. J Adm Publik. 2018;4(5):2.